

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja Badan Kesbangpol selama satu tahun terakhir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Laporan ini memuat berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja, serta berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya dan pencapaian yang telah diraih oleh Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja sama dengan kami.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Badan Kesbangpol di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab demi mewujudkan Kabupaten Kebumen yang lebih maju dan sejahtera.

Kebumen, 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681128 199603 1 006

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Fungsi Strategis..	6
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi	7
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	 10
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.2. Rencana Strategis (Renstra).....	11
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
2.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Kinerja	13
2.5 Perjanjian Kinerja	14
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	 26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi Anggaran.....	38
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	41
 BAB IV : PENUTUP	 48
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	48
4.2. Permasalahan/Kendala	49
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12
Tabel 2.2	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	13
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	26
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	27
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	28
Tabel 3.4	Tabel Kemajuan Sasaran Strategis	28
Tabel 3.5	Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten lain	30
Tabel 3.6	Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	31
Tabel 3.7	Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	32
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	38
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Sumber Daya	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	3
------------	---	---

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Jumlah pegawai menurut eselon/ jabatan	4
Diagram 1.2. Jumlah pegawai menurut golongan	5
Diagram 1.3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan	5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pembinaan ideologi, integrasi bangsa, dan penguatan politik dalam negeri. Bakesbangpol berperan penting dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat pentingnya peran tersebut, diperlukan evaluasi berkala melalui laporan kinerja untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bakesbangpol.

Sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah sebagai organisasi publik harus lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dalam Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Setiap SKPD diharapkan dapat membuat rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan menghasilkan kinerja organisasi berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

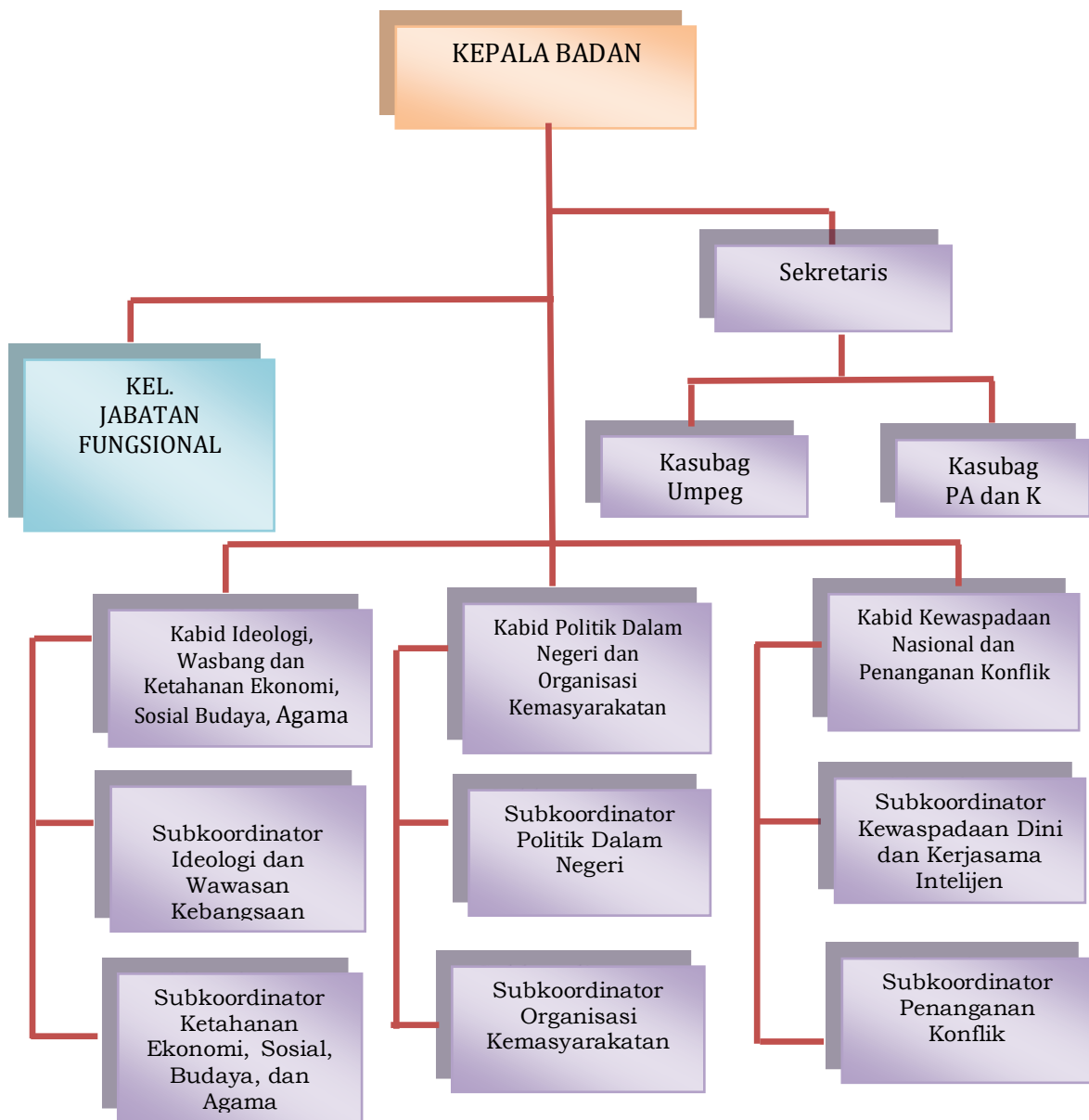
Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan Good Government Governance (GGG), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum. Selanjutnya diharapkan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun berikutnya dan dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Kebumen selanjutnya.

Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 yaitu terdiri dari Kepala Badan yang dibantu oleh satu orang Sekretaris membawahi 2 Kasubbag dan tiga Kepala Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi dan Tatalaksana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

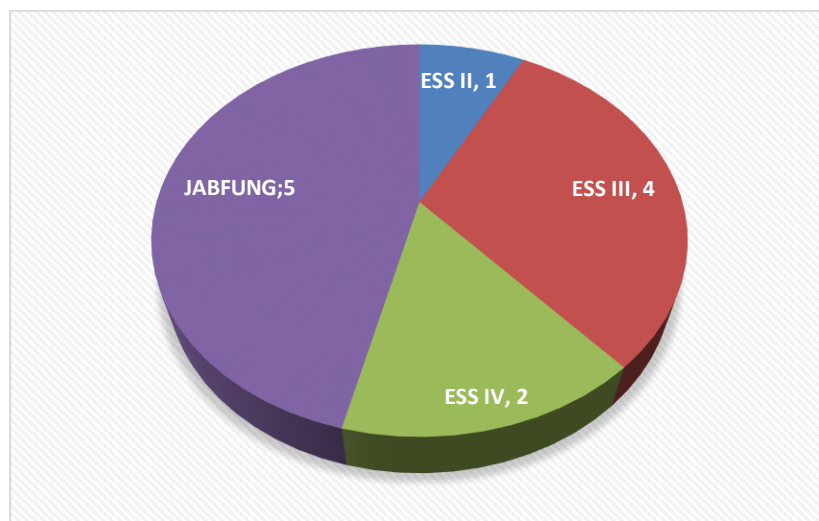


Adapun Jumlah sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan tupoksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan rincian struktural, fungsional maupun fungsional umum berdasarkan jenis kepegawaian sebagaimana tercantum dalam diagram dibawah ini :

1. Struktural :

- a. Kepala Badan, eselon II.
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang, eselon III.
- c. Kepala Subbag, eselon IV.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Diagram 1.1.
Jumlah Pegawai Menurut Eselon / Jabatan

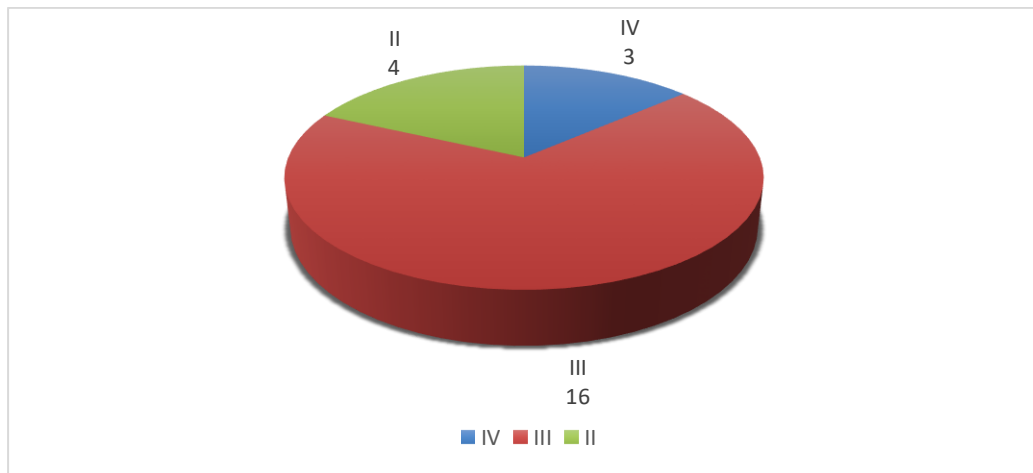


2. Keadaan Pegawai

a. Menurut Golongan

Berdasarkan golongan, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat digambarkan dalam diagram di 1.2 berikut :

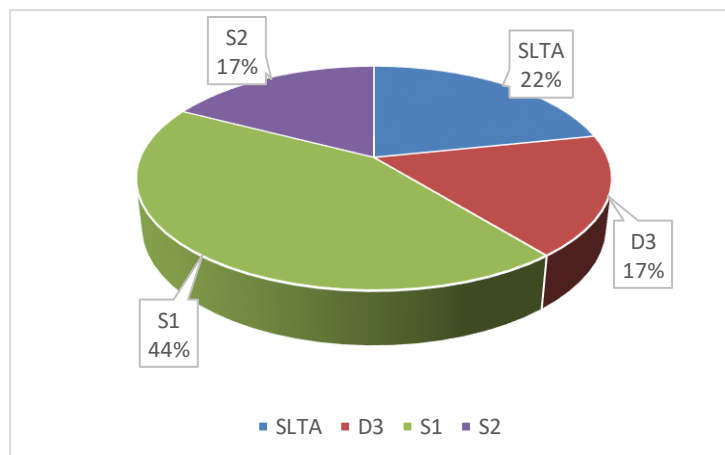
Diagram 1.2.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan



Dengan melihat komposisi pegawai pergolongan di atas dapat diketahui bahwa pegawai Bakesbangpol didominasi oleh Golongan III, kemudian golongan II dan IV. Dengan mempertimbangkan distribusi golongan pegawai dalam OPD Bakesbangpol, kebijakan gaji dan pengembangan karir dapat dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan memberikan peluang yang adil bagi semua pegawai.

b. Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

Diagram 1.3
Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan karyawan /karyawati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 masih di dominasi oleh lulusan S1 (44%) hal ini tentunya memberikan dampak positif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Karena individu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas-tugas dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kerja.

1.2. Fungsi Strategis

Fungsi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2020, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi ,pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan monitong, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Forum Pimpinan Daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dipetakan sebagai berikut :

- 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, an Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
 - a. Munculnya paham-paham radikal atau ekstremisme yang mengancam keutuhan Bangsa Indonesia karena adanya pengaruh ideologi asing yang merongrong ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Menurunnya toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
- d. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. Derasnya arus masuk budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih rendah;
- c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;
- d. Kurangnya representasi perempuan dalam kegiatan politik dan organisasi kemasyarakatan;
- e. Adanya konflik antarorganisasi kemasyarakatan yang dapat merugikan stabilitas sosial.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

- a. Jumlah personel yang terbatas menghambat efektivitas operasional Kesbangpol dalam memonitor dan menanggapi potensi konflik;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
- c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
- e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

1.4. Tindak lanjut AKIP Internal Tahun 2024 atas Laporan Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, beberapa hal yang harus ditindaklanjuti antara lain :

1. Melaksanakan monitoring Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun, untuk perbaikan strategi dan aktivitas dalam mencapai kinerja. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan monitoring secara berkala Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja pada tanggal 19 Juli 2024.
2. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu dengan menyusun SOP tentang Mekanisme dan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Badan Kesbangpol.
3. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan yaitu menyajikan analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia dalam laporan kinerja yang dituangkan dalam BAB III LKJiP.
4. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada BAB I (Pendahuluan). Tindak lanjut yang dilaksanakan dengan mencantumkan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah suatu proses perumusan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Dalam konteks organisasi perangkat daerah (OPD), perencanaan strategis memiliki peran penting dalam membimbing kebijakan dan program agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang.

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu :
“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menjalankan misi yang ke-5 yaitu Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Strategi yang ingin dicapai dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan misi tersebut antara lain :

1. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
2. Pemberdayaan potensi Ormas.
3. Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
4. Meningkatkan kewaspadaan dini di daerah.

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Sebagai berikut :

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan memberikan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang multi kultur.
2. Menumbuhkan kesadaran wawasan kebangsaan.
3. Pembentukan jiwa patriotisme melalui program bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan.
4. Penguatan ketahanan ekonomi.
5. Penguatan fungsi FKUB dan FPBI/FPK.
6. Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
7. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah melalui FKDM.
9. Penguatan Tim Penanganan Konflik Sosial.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi

3. TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target indikator kinerja sasaran strategis adalah nilai atau tingkat pencapaian yang diinginkan untuk suatu indikator kinerja tertentu yang terkait dengan tujuan strategis suatu organisasi atau perangkat daerah. Sasaran strategis mengacu pada tujuan jangka panjang yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam konteks ini, target indikator kinerja sasaran strategis membantu mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan strategisnya.

Target indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir Renstra 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan		Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	78,57
		Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	57,14	60,71	64,29	71,43	75	78,57	78,57

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja menjadi alat yang penting dalam memastikan keterlibatan dan tanggung jawab perangkat daerah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah secara keseluruhan. Selain itu, perjanjian kinerja juga berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	71,43	71,43	-	-	-	71,43
	Sasaran:								
2	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	%	71,43	71,43	-	-	-	71,43

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.359.651.000,00	3.500.835.000,00	APBD Kabupaten
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	568.417.000,00	568.417.000,00	APBD Kabupaten
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	39.123.048.000,00	39.263.803.000,00	APBD Kabupaten
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.408.000,00	76.108.000,00	APBD Kabupaten
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	159.908.000,00	159.908.000,00	APBD Kabupaten
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.699.622.000,00	2.706.422.000,00	APBD Kabupaten

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target sebelum perubahan	Target sesudah perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	28%	29%	30%	13%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.359.651.000,00	3.500.835.000,00	APBD Kabupaten

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	55,93 jumlah per 100.000 penduduk	-	-	55,93	-
2.	Meningkatkan Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	75 jumlah per 100.000 penduduk	-	75	-	-

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp)	KETERANGAN*
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	568.417.000,00	APBD Kabupaten
2.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	159.908.000,00	APBD Kabupaten

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Capaian Partisipasi Masyarakat/	69,38%	69,38%	69,38%	-	-	-

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
	melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Penduduk Dalam Proses Pemilihan Umum						
2.	Meningkatkan kapasitas pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan orang asing.	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	-	60%	40%	-

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1.	Program Peningkatan Peran Serta Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	39.123.048.000,00	39.263.803.000,00	APBD Kabupaten
2.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	68.408.000,00	76.108.000,00	APBD Kabupaten

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	Persentase Penanganan Konflik Berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.	71,43%	71,43%	-	-	-	71,43 %

No.	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan*
1.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kulaitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	1.699.622.000,00	2.706.422.000,00	APBD Kabupaten

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12	3	3	3	3
2	Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	3	3	3	3
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	3	2	-	1	-
4	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	3	3	3	3
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43	43	20	10	11	2

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.048.957.000,00	3.177.391.000,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.713.000,00	90.713.000,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	25.300.000,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.310.000,00	116.760.000,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.699.000,00	83.699.000,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	7	4	1	1	1

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Keterangan*
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.972.000,00	APBD Kabupaten

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	23	-	-	23	-

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Keterangan*
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	568.417.000,00	APBD

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran	150	150	-	-	150	-

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan ormas Asing di Daerah						
2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	36	36	9	9	9	9

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 56.990.000,00	Rp 64.690.000,00
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 11.418.000,00	Rp 11.418.000,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5	1	2	2	-
2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130	130	-	-	-
3.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik	1	-	-	1	-

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Keterangan*
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	52.073.000	APBD
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	138.729.000,00	APBD
	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	5.604.000	APBD

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	4	1	1	1	1
2	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	130	130	130	-	-	-

	Konflik di Daerah							
3.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5	5	1	2	1	1

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	89.738.000,00	89.738.000,00
	2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	286.696.000,00	286.696.000,00
	3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.126.782.000,00	2.133.582.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kebumen sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam membentuk dan memelihara harmoni sosial, keutuhan bangsa, serta stabilitas politik di tingkat lokal. Dalam setiap langkahnya, Kesbangpol Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja suatu organisasi menjadi dasar utama dalam membangun akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, bab ini dirancang untuk memberikan gambaran holistik mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Adapun skala pengukuran untuk mengukur capaian kinerja sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen direpresentasikan oleh capaian indikator strategis organisasi.

A. Capaian Kinerja Sasaran

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	71,43	100	140	Sangat baik	Aplikasi Semarak

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

1. Capaian Kinerja Tahun 2024.

Realisasi capaian indikator sasaran sampai dengan Desember Tahun 2024 sebesar 140%, hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran telah melampaui target yang telah ditetapkan atau dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target Tahun 2024 sebesar 71,43 % dengan realisasi 100%.

Dari hasil evaluasi capaian indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi tercapai 100%, dengan demikian capaian kinerja Sasaran telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.

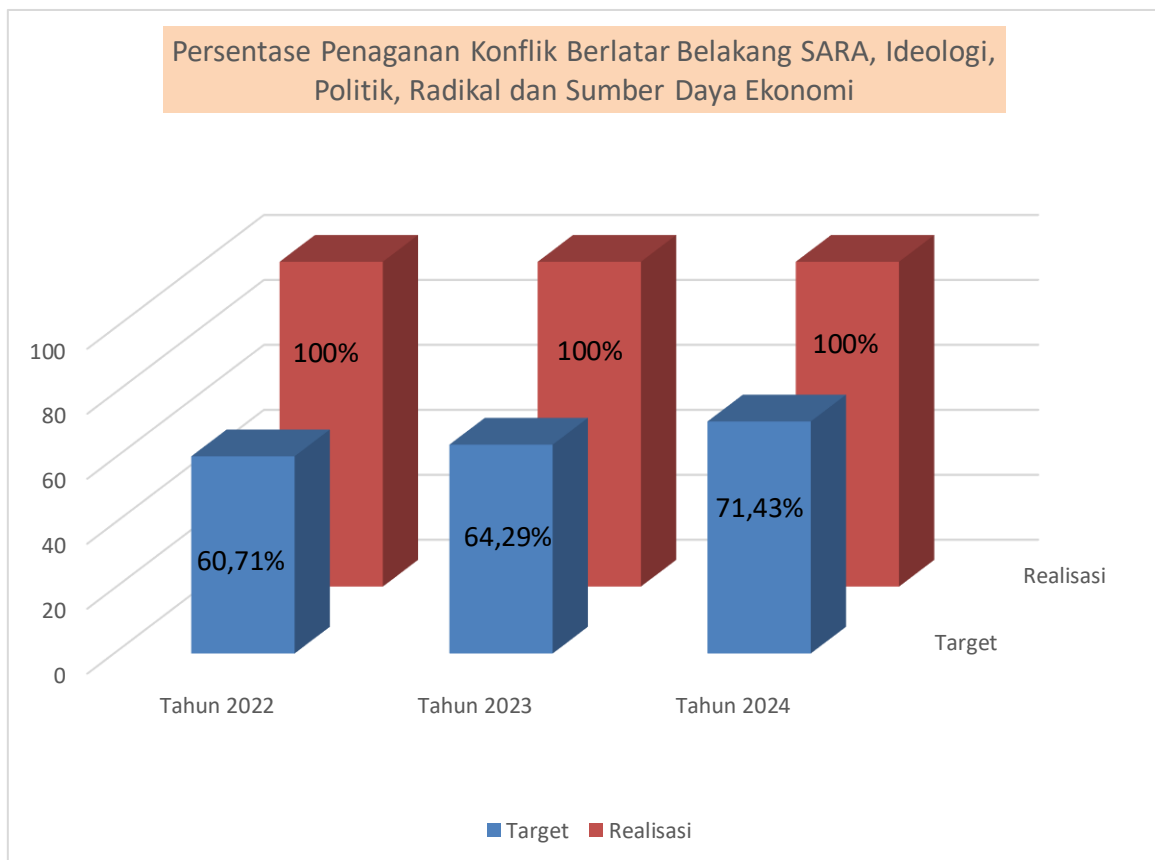
Untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran perlu melakukan komparasi dengan capaian tahun lalu. Adapun komparasi capaian kinerja tersebut sebagaimana Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3.
Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	2022			2023			2024		
		Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	60,71	100	164,72	64,29	100	155,54	71,43	100	140

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

Grafik 3.1



Grafik batang di atas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Data ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, target kinerja yang ditetapkan sebesar 60,71% berhasil dicapai dengan realisasi 100% atau dengan capaian sebesar 164,72%.

Selanjutnya, pada tahun 2023, target kinerja meningkat menjadi 64,29% dengan realisasi mencapai 100% atau capaiannya 155,54%, yang menandakan keberhasilan dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program meskipun target mengalami peningkatan.

Tahun 2024 menunjukkan peningkatan target yang signifikan, yaitu sebesar 71,43%. Meski target semakin tinggi, realisasi tetap mencapai 100% atau capaiannya sebesar 140%, hal ini menegaskan komitmen Bakesbangpol Kabupaten Kebumen untuk terus meningkatkan performa dan mewujudkan rencana strategis secara maksimal.

3. Perbandingan Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam Renstra.

Dalam mengevaluasi kinerja hingga saat ini perlu dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra. Adapun komparasi capaian kinerja tersebut sebagaimana Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Tabel Kemajuan Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
			Target %	Realisasi %		
1	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	71,43	100	78,57	127,27%

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

Target akhir periode perencanaan Tahun 2026 yaitu 78,57%. Dari realisasi yang telah dicapai pada tahun 2024 sebesar 100%, menunjukkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Kota Salatiga

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Bakesbangpol Kab. Kebumen 2024	Realisasi Bakesbangpol Kota Salatiga (2024)	% Capaian
1	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100%	100%	100%

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

Berdasarkan table di atas, maka capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dengan indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian kinerja Bakesbangpol Kota Salatiga, maka realisasi kinerjanya telah tercapai 100%.

4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
A	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	71,43%	100%	140 %	Keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran Bakesbangpol didukung hal-hal sebagai berikut : 1. Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sehingga setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpotensi menjadi konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani. 2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini serta Pusat Komunikasi dan Informasi yang melibatkan berbagai unsur intelegen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini serta penanganan konflik 3. Sinergitas antar Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen 4. Adanya peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam memfasilitasi solidaritas antar umat beragama, moderasi beragama, dan toleransi serta memperkuat kerukunan diantara elemen masyarakat, sehingga hal ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial. 5. Penanganan konflik berbasis kearifan lokal dalam rangka menciptakan solusi yang dapat diterima semua pihak dengan mengedepankan musyawarah dan dialog. 6. Dilaksanakannya komunikasi sosial antar tokoh masyarakat sehingga meningkatkan hubungan sosial di	

						masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik.	
						7. Pemberdayaan potensi Ormas, karena Ormas memiliki akses langsung ke komunitas dan akar rumput, sehingga dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta membantu dalam mendeteksi potensi konflik lebih awal melalui laporan atau informasi langsung dari lapangan.	

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

b. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi sebagaimana tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
A	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100				
1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	100	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	100	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa</i>	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				<i>Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	100	Menunjang
2				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	181,03	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>	100	Menunjang
3				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	410,63	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang</i>	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				<i>Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>		
				<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	100	Menunjang
4				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Capaian Partisipasi Masyarakat/ Penduduk Dalam Proses Pemilihan Umum	100	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	100	Menunjang
5				Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	100	Menunjang
6				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.	100	Menunjang
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang</i>	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					<i>Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>		
				<i>Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	100	Menunjang
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan</i>	100	Menunjang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				<i>Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>		
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100	Menunjang

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dan penyerapan anggaran yang dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran Rp. 46.275.493.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 44.761.423.774,00. Anggaran dan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 tertera pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.835.000,00	3.338.367.122,00	95,36
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.972.000,00	6.971.700,00	99,99
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.177.391.000,00	3.021.669.755,00	95,10

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.713.000,00	90.112.532,00	99,34
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.300.000,00	25.175.000,00	99,51
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.760.000,00	110.958.055,00	95,03
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.699.000,00	83.480.080,00	99,74
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	568.417.000,00	568.319.522,00	99,98
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	568.417.000,00	568.319.522,00	99,98
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	39.263.803.000,00	39.072.218.615,00	99,51

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	39.263.803.000,00	39.072.218.615,00	99,51
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	76.108.000,00	75.885.540,00	99,71
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	76.108.000,00	75.885.540,00	99,71
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	159.908.000,00	152.823.600,00	95,57
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	159.908.000,00	152.823.600,00	95,57
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	2.706.422.000,00	1.553.809.375,00	57,41

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.706.422.000,00	1.553.809.375,00	57,41

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Analisis Sumber Daya Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, membutuhkan sumber daya diantaranya yaitu anggaran. Anggaran merupakan sumber daya yang penting dan terbatas, sehingga perlu dikelola dengan efisien. Efisiensi anggaran menghasilkan output yang optimal dengan input yang minimal. Adapun analisis terhadap sumber daya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024, sebagaimana Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100%	3.500.835.000,00	3.338.367.122,00	95,36%	0,99
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	100%	6.972.000,00	6.971.700,00	99,99%	0,99
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	3.177.391.000,00	3.021.669.755,00	95,10%	0,99
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	90.713.000,00	90.112.532,00	99,34%	0,99
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	3 unit	100%	25.300.000,00	25.175.000,00	99,51%	0,99
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	116.760.000,00	110.958.055,00	95,03%	0,99

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43 unit	43 unit	100%	83.699.000,00	83.480.080	99,74%	0,99
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	55,93 jumlah per 100.000 penduduk	62,93 jumlah per 100.000 penduduk	112,52 %	568.417.000,00	568.319.522,00	99,98%	0,99
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23 kegiatan	23 kegiatan	100%	568.417.000,00	568.319.522,00	99,98%	0,99
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian partisipasi masyarakat/ penduduk dalam proses pemilihan umum	69,38%	75,85%	109,33%	39.263.803.000,00	39.072.218.615,00	99,51%	0,99

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	39.263.803.000,00	39.072.218.615,00	99,51%	0,99
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	76.108.000,00	75.885.540,00	99,71%	0,99
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	76.108.000,00	75.885.540,00	99,71%	0,99
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	75 jumlah per 100.000 penduduk	90,71 jumlah per 100.000 penduduk	120,95%	159.908.000,00	152.823.600,00	95,57%	0,99

No.	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 lokasi	5 lokasi	100%	159.908.000,00	152.823.600,00	95,57%	0,99
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	71,43%	100%	140%	2.706.422.000	1.553.809.375	57,41%	1,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 dokumen	dokumen	100%	2.706.422.000	1.553.809.375	57,41%	0,99

Sumber : Bakesbangpol Kebumen 2024

Berdasarkan Tabel di atas, alokasi anggaran Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebesar Rp 46.275.493.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.761.423.774,00. atau 96,73%. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil serta melakukan efisiensi anggaran.

Efisiensi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen antara lain pada kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Efisiensi pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah karena adanya 1 orang karyawan PNS (subkoordinator) yang pensiun dan 1 orang karyawan PNS (subkoordinator) meninggal dunia belum terisi sampai dengan akhir tahun anggaran.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Efisiensi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah karena adanya penghematan belanja pada rekening listrik.

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Efisiensi pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial karena Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan cuti pada Pilkada 2024.

2. Analisis Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dihadapkan pada tantangan besar dalam hal sumber daya manusia. Berdasarkan peta jabatan yang telah disusun, kebutuhan ideal pegawai untuk menjalankan seluruh fungsi dan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 63 orang. Namun, kenyataannya jumlah pegawai yang ada saat ini hanya sebanyak 23 orang, dengan rincian pejabat struktural eselon II 1 orang, eselon III 4 orang, eselon IV 2 orang, pejabat fungsional 6 orang dan fungsional umum sebanyak 10 orang. Jadi kekurangan pegawai sebanyak 40 orang atau dengan persentase kekurangan sebanyak

63,49%. Meskipun terdapat kesenjangan yang signifikan, Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Badan Kesbangpol telah menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal / instansi vertikal. Sinergi ini mendukung dalam pencapaian target kinerja meskipun dengan jumlah pegawai yang terbatas.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, kinerja organisasi tetap dapat dipertahankan meskipun jumlah pegawai belum memadai. Namun, untuk keberlanjutan jangka panjang, perekrutan tambahan jumlah pegawai hingga kondisi optimalisasi menjadi langkah yang tidak dapat dihindari guna memastikan stabilitas dan kualitas kinerja organisasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Tujuan penyusunan laporan LKJIP adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan LKJIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menguraikan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan misi organisasi. Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu :
“Terwujudnya kewaspadaan dini daerah dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi” terealisasi 100% dari target 71,43% atau persentase capainnya sebesar 140%.
2. Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dari pagu Rp 46.275.493.000,00 terealisasi 44.761.423.774,00. atau 96,73%.

4.2 Permasalahan/Kendala

Dalam mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permasalahan dan kendala tersebut diantaranya :

1. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik sumber manusia serta sarana dan prasarana.
2. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang luas, tentunya menjadi kendala dalam pengawasan dan penanganan apabila terjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
3. Globalisasi informasi saat ini yang semakin berkembang disamping membawa kemajuan bagi masyarakat, namun memiliki dampak negatif seperti nilai-nilai luhur budaya bangsa semakin luntur di masyarakat yang tentunya dapat mengancam disintegrasi bangsa.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang perlu adanya strategi yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Analisis kinerja.

Melaksanakan analisis kinerja saat ini dengan melakukan analisis terhadap proses dan pencapaian kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

2. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).

Dengan keterbatasan jumlah pegawai saat ini, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan kerja pegawai.

3. Penerapan Teknologi Informasi.

Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

4. Kolaborasi antarunit.

Meningkatkan koordinasi antar bidang dan sekretariat dalam mencapai tujuan organisasi.

5. Penghargaan dan pengakuan.

Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat memacu kinerja organisasi untuk lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kebumen, 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199603 1 006

